

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya anggapan bahwa perempuan merupakan kaum lemah masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Perbedaan antara laki- laki dan perempuan yang telah di konstruksikan secara sosial budaya telah memunculkan berbagai masalah gender yang sampai detik ini diyakini banyak merugikan kaum perempuan, hal ini disebabkan sistem nilai, norma, pelabelan/*stereotipe*, serta ideologi gender telah lama dilihat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi posisi serta hubungan perempuan dengan laki-laki, atau dengan lingkungan dalam konstruksi sosial masyarakat. Nilai dan norma tentang perempuan dalam masyarakat akan tumbuh dan berkembang dari konsensus di dalam masyarakat yang telah dibawa sejak dulu secara turun-temurun, seiring dengan perkembangan zaman, tatanan nilai dan norma tersebut akan terus mengalami perkembangan maupun proses rekonstruksi dalam proses sosialnya. Walaupun demikian, cara pandang tentang perempuan atau ideologi gender tidak dapat dipisahkan dari nilai kultural sebagai pelengkap hubungan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya prakonsepsi yang diterima sebagai kesepakatan/ konsensus

bersama, legitimasi moral dari kelompok yang paling dominan dalam masyarakat.

Perbedaan dalam gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) (Mansour Fakih, 2010:12). Namun yang menjadi persoalan ketika perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan baik laki- laki dan terkhusus kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari adanya sistem tersebut. Guna memahami perbedaan gender, dapat dilihat melalui berbagai ketidakadilan yang terjadi.

Ketidakadilan gender dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi bidang ekonomi, pembentukan stereotipe negatif, kekerasan, beban kerja lebih dan banyak (*Burden*), serta sosialisasi ideologi peran gender. Bentuk manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisahkan sebab saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara konstruksi budaya. Pandangan gender beranggapan bahwa perempuan itu irasional sehingga tidak bisa untuk memimpin. Sehingga, memunculkan sikap bahwa posisi perempuan tidaklah penting. Ketidakadilan atau subordinasi gender ini terjadi dalam segala macam bentuk dimanapun dan kapanpun.

Kultur masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkhis memungkinkan terdapatnya pendikotomian serta subordinasi terhadap nilai

dan peran gender yang merupakan gambaran dari konstruksi sosial serta budaya relasi laki- laki dan perempuan. Pada dasarnya pembedaan tersebut tidak akan menjadi masalah selama pembedaan tersebut tidak merendahkan baik laki- laki maupun perempuan. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat ditemukan pendikotomian/pembedaan berdasarkan jenis kelamin tertentu dan yang lebih banyak adalah perempuan yang menjadi korban (Mansour Fakih, 2010:45). Dalam perkembangan masyarakat terjadi adanya perubahan peran dan status dan itu merupakan proses yang menjadi kebiasaan dan telah membudaya. Perubahan ini terkadang menimbulkan adanya ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya akibat adanya perubahan peran tersebut maka peran publik atau umum sebagai peran laki-laki, sedangkan peran domestik merupakan sebagai peran perempuan.

Secara tradisi yang telah turun- temurun, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang beruntung yaitu hanya terpusat pada aktifitas rumah tangga atau urusan domestik. Akibat dengan adanya tradisi yang telah turun-temurun maka beredar anggapan bahwa perempuan tidak usah sekolah atau mempunyai pendidikan tinggi- tinggi karena pada akhirnya akan diperistri dan mempunyai anak serta mengurus anak dan suami. Hal ini secara tidak langsung telah terinternasialisasi kepada setiap generasi dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah nilai atau konsensus yang berlaku dalam masyarakat

sehingga menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia masih menunjukan adanya tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender. *Human Development Index* Indonesia tahun 2006 menunjukkan 69,6 hal ini tentunya masih jauh dari patokan *Human Development Index* Asia Pasifik, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 187 negara. Guna mengetahui pembangunan berdasar atas gender , maka dipakai Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG Indonesia tahun 2005 hanya berada pada angka 65,1, sehingga angka IPG lebih rendah dari angka IPM. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan dan ketimpangan gender serta menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan masih berada jauh di bawah kualitas hidup laki-laki. Nilai IPG ini merupakan perbandingan antara kualitas hidup laki-laki serta perempuan(http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2260&Itemid=219, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012, Pukul 09.38 WIB).

Pengukuran IPM dan IPG berdasarkan tiga kategori, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Bedanya, pada IPG memakai pengukuran dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Pengukuran lain yang menunjukkan ketimpangan peran laki-laki dan

perempuan ditunjukkan juga dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indeks yang memperlihatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. Semua kategori pengukuran IPM, IPG maupun IDG di Indonesia masih sangat tertinggal, keadaan ini diperparah dengan terjadinya konflik antarsuku, budaya agama dan lain-lain. Kejadian kekerasan terhadap perempuan juga dapat menghambat pembangunan, karena dengan adanya kekerasan ini perempuan makin terpuruk dan makin tertinggal, sedangkan jumlah penduduk Indonesia, perempuan dan laki-laki hampir sama.

Pembudayaan masyarakat Indonesia yang begitu patriarkhis mengarah pada diskriminasi perempuan, yang mana terjadi pendikotomian nilai dan peran gender yang di konstruksi melalui sosial budaya relasi laki- laki dan perempuan. Bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan salah satunya adalah dalam bidang peningkatan karier dan politik terkadang perempuan masih dianggap belum pantas untuk memimpin dengan alasan bias gender.

Pemahaman akan nilai dan peran gender yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan proses sosialisasi di masyarakat menjadi terhambat. Sehingga seolah- olah masyarakat pun memberikan pelabelan kepada perempuan bahwa mereka tidak mampu untuk memimpin.

Dalam hal ini terjadi adanya perbedaan gender yang menekankan ketidaksamaan sosial dalam organisasi Muhammadiyah terutama pada kaum perempuan yang dirasa masih begitu sulit untuk dapat masuk menjadi pengurus inti Muhammadiyah baik di pusat, wilayah, cabang, atau ranting. Hal ini dikarenakan konstruksi budaya organisasi yang dibangun memang tidak mendukung perempuan untuk masuk kedalam Muhammadiyah. Kuatnya kultur patriarki yang dilanggengkan oleh sistem dan struktur yang ada, sehingga kemudian dipahami bahwa Muhammadiyah hanya untuk laki-laki semata, namun perempuan hanya dipersepsikan sebagai subbagian dari Muhammadiyah, yaitu perempuan adalah Aisyiyah, sedangkan laki-laki adalah Muhammadiyah, seperti dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah beranggotakan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada aturan di Muhammadiyah yang melarang perempuan untuk berkiprah pada berbagai level, antara lain kepemimpinan struktur. Padahal jika kita telaah lebih dalam ada beberapa ayat dalam Al- Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan dan laki- laki mempunyai kedudukan yang sama. Ada beberapa ayat yang menggambarkan bahwa perempuan dan laki- laki sama kedudukannya, salah satunya adalah QS. Al Zariyat/ 51: 56, QS. Al- Hujurat/ 49: 13, QS. Al- An'am/ 6: 165 (Asror Yusuf, 2010:61).

Ketiga surat tersebut telah menjelaskan bahwa kaum perempuan dan laki- laki mempunyai proporsi yang sama akan setiap kegiatan yang mereka

lakukan. Pada dekade sekarang ini peran perempuan dalam Muhammadiyah sudah mulai terlihat dengan menduduki salah satu jabatan yang ada pada Muhammadiyah pusat maupun di wilayah. Meskipun demikian, perlu adanya peran terutama pada organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah yang membawahi perempuan dalam hal ini Aisyiyah terutama di Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak kader perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender pada organisasi Muhammadiyah baik dalam berbagai kegiatan dan struktur Muhammadiyah.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran kesetaraan gender Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah dengan melakukan studi pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta yang nantinya akan difokuskan pada permasalahan tentang bagaimana konstruksi gender yang ada pada organisasi Muhammadiyah serta bagaimana peran kesetaraan gender Aisyiyah sebagai motor penggerak perempuan dalam organisasi Muhammadiyah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Budaya patriarkhi masyarakat Indonesia yang menyebabkan pendikotomian nilai serta peran gender.

2. Masih adanya superordinasi dan subordinasi dalam organisasi Muhammadiyah.
3. Kurangnya peran perempuan dalam mendapat peran- peran penting dalam organisasi Muhammadiyah.
4. Konstruksi budaya organisasi pada Muhammadiyah yang belum memaksimalkan peran perempuan.
5. Adanya kultur yang kuat sehingga terjadi pendikotomian bahwa Muhammadiyah hanya untuk laki- laki, Aisyiyah untuk Perempuan.
6. Tidak ada aturan di Muhammadiyah yang melarang perempuan untuk berkiprah pada berbagai level, antara lain kepemimpinan struktur, namun masih sedikit peran dari Aisyiyah yang terlibat dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah.
7. Dalam Al- Qur'an terdapat beberapa surat yang menyatakan kedudukan perempuan dan laki- laki sama, namun kenyataannya dalam organisasi keagamaan khususnya Muhammadiyah belum dilaksanakan.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dikaji agar lebih fokus dan lebih spesifik sehingga diperoleh kesimpulan yang terarah pada aspek yang akan diteliti, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yakni Peran Kesetaraan Gender Aisyiyah Dalam Organisasi Islam: Studi Pada Pimpinan Daerah Aisyiyah

Kota Yogyakarta. Batasan/ cakupan masalah dibatasi tentang serta bagaimana peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak perempuan dalam organisasi Muhammadiyah dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran kesetaraan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah?.
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kesetaraan gender Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam organisasi Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran kesetaraan gender Aisyiyah dalam organisasi Muhammadiyah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi dan informasi serta kontribusi terhadap kajian gender untuk penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu sosiologi yang berkaitan dengan mengenai kajian gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah dan meningkatkan wawasan.

- b. Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi bagi para dosen dalam kajian mengenai hal- hal yang terkait dengan gender.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan refenrensi dan informasi serta menambah wawasan tentang kesetaraan gender dalam berbagai bidang.

d. Bagi Organisasi Muhamamdiyah dan Aisyiyah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh kedua organisasi tersebut baik Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk bersama-sama membangun konstruksi gender yang proporsional.